



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

UNIT KERJA : DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIRMANSYAH N. NAZAROEDIN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 113806

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 18.740.046.000

1. Bangunan Seluas 4 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 925 m²/500 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 13.634.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m²/228 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 2.595.153.000
4. Tanah Seluas 191 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.310.893.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 740.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. MOBIL, MERCEDES BENZ E 320 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.125.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 5.905.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.194.941.866

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp. 32.704.987.866

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 32.704.987.866

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.